YuhuNama : Adriani

Nim : 10200120154

Kelas : HTN-D

Resume HTN

“Partai politik dan pemilihan umum ”

A. Partai politik

1. Pengertian

partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara. Kemudian diturunkan kata-kata polities yang berarti warga negara, politikus te ckne' berarti kemahiran politik dan politike epistema yang berarti ilmu politik. secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Secara umum dapat dikatakan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Menurut **Carl j. Friedrich** yang dikutip miriam Budiardjo, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. **Sigmund Neumann** menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merupakan dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. jadi secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah organisasi dengan mana orang ataupun golongan berusaha untuk memperoleh serta menggunakan kekuasaan. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

2. Sejarah partai politik

dunia partai politik pertama tama lahir di negara Eropa barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. maka dalam perkembangan selanjutnya partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis serta mewakili aspirasi rakyat. perjalanan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing yaitu :

- **Masa penjajahan Belanda**
masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik Indonesia lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun berasaskan politik agama dan sekuler seperti serikat Islam PNI dan partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. kehadiran partai politik pada masa

permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia setelah didirikan dewan rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan lainnya pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam dewan rakyat, yaitu fraksi nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamrin, PPBB (perhimpunan pegawai bestuur Bumi putera) di bawah pimpinan Prawoto di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

- Masa pendudukan Jepang
pada masa ini semua kegiatan partai politik dilarang hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk yaitu partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan
- Masa merdeka
beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah partai-partai politik Indonesia dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan empat partai politik besar yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI.

3. Fungsi partai politik

Fungsi utama dan pertama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum partai politik baik dalam sistem politik apapun apalagi sistem politik demokrasi ia pasti harus melaksanakan sejumlah fungsi diantaranya :

- Sosialisasi politik
yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. proses ini berlangsung seumur hidup baik diperoleh secara sengaja maupun secara tidak sengaja.
- Rekrutmen politik
pengertian rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya semakin besar fungsinya manakala partai politik itu mayoritas di parlemen, sehingga berwenang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan publik kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemanduan kepentingan.
- Komunikasi politik
Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada warga masyarakat dan dari warga masyarakat kepada pemerintah. dalam konteks ini partai politik berfungsi sebagai komunikator politik tidak terbatas menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada warga masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah. Keduanya dilaksanakan oleh partai politik dalam sistem politik demokrasi.
- Pengendalian konflik
Dalam negara demokrasi setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik

merupakan gejala yang sukar dielakan. Sistem politik hanya akan menetralsir konflik yang tidak menghancurkan dirinya dengan demikian permasalahannya bukan menghilangkan konflik itu melainkan mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi tersebut. fungsi control ini adalah merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka memperbaiki dan memperbarui dirinya secara terus menerus.

- **Partisipasi politik**
partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintah melalui suatu pemilihan umum yang teratur dan demokratis. Kegiatan dimaksud diantaranya mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan pemimpin, mendukung calon pemimpin
- **Pemandu kepentingan**
untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan. partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk bisa mengendalikan konflik melalui cara dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah dalam perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.
- **Kontrol politik**
Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam pengertian bahwa suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada saat melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolak ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif .

Menurut miriam Budiardjo fungsi partai politik ada empat yaitu :

- (1) Sarana komunikasi politik
- (2) Sosialisasi politik
- (3) Sarana rekrutmen politik
- (4) Pengatur konflik

Selanjutnya menurut Yves Menu and Andrew Knapp fungsi partai politik mencakup antara lain : mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekrutmen politik, sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

namun kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta perekrutan politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Di samping itu, sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat ke sistem yang rendah serta kurang mengakar di tengah-tengah masyarakat.

4. Partai politik dari tinjauan demokrasi

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi parlementer tahun 1945-1959, demokrasi terpimpin tahun 1959-1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai sekarang. demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. dan dasar demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menentukan bentuk dan isi

pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui lembaga perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif demi kesejahteraan rakyat itu tersendiri sehingga kebijakan tersebut bukan atas keinginan sang penguasa negara.

sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggara demokrasi di Indonesia, artinya tak ada demokrasi tanpa partai politik oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik sehat dan profesional. persoalan yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik untuk rakyat. Dalam hal ini fungsi partai politik bagi negara adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa dan dan fungsi partai politik terhadap rakyat di antara lain adalah mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan serta menampung aspirasi rakyat selaku negara yang menganut demokrasi Pancasila

B. Pemilihan umum

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR DPD DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam menyalurkan pilihan-pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 kali dan mempunyai nilai yang sama yaitu 1 suara hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value.

Dan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

pada tahun 2004 pemilihan umum telah dilaksanakan secara langsung di Indonesia yang diikuti oleh berbagai partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden DPR dan DPD serta pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden telah dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 6a ayat 1, tersosialisasinya pasal 6a ayat 1 undang-undang dasar 1945 ini baru pada waktu pemilihan presiden tahun 2004 sekaligus pemilihan legislatif untuk tingkat pusat. di samping pemilihan presiden secara langsung juga berlaku dalam pemilihan kepala daerah ini didukung oleh undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 24 ayat 5 yang berbunyi "*kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*" sebelum timbulnya pasal 24 ayat 5 ini, proses pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999.

Adapun semangat yang mendasari perlunya Pilkada secara langsung oleh rakyat daerah tidak terlepas dari latar belakang sebagai berikut :

- undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan pendukung lain di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan karena adanya amandemen UUD 1945, terutama pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.
- Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti akan mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran.
- Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum diakui secara global sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Menurut teori demokrasi minimalis pemilu merupakan sebuah arena yang memadai kompetisi antara aktor politik untuk meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan. meskipun banyak kalangan menilai konsepsi demokrasi seperti ini cenderung minimalis namun praktek demokrasi yang minimalis tersebut telah membentuk sebuah sistem penentuan di sebuah negara demokratis. artinya bahwa pemilu telah berlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme universal dalam sistem politik di negara-negara demokratis. dalam konteks pemilu mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter (Robert Dahl) :

- Pemilihan umum
- Rotasi kekuasaan
- Rekrutmen secara terbuka
- Akuntabilitas politik

Merujuk pada pandangan tersebut semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengontruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan. dalam negara demokrasi modern pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. pemilihan yang berkualitas harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyat. Pada titik ini konsepsi universalitas individu dalam demokrasi harus dijunjung. Bahwa semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya sehingga partisipasi politik dalam hal ini keikutsertaan warga negara dalam pemilu menjadi penting. pada sisi yang sama pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara akan mendorong kualitas demokrasi.

partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaannya pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utama adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang

diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal kenyataannya selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermassa secara hukum adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

kualitas pemilu akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilu akan semakin berkualitas pula. penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola strategi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. bagaimana memilih anggota legislatif yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan pemilu dimulai.

Kesimpulan : partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.

Referensi : Syarif Kasim “ eksistensi partai politik dan pemilu langsung dalam konteks demokrasi di Indonesia” <https://media.neliti.com>

Kiki Mikail “pemilu dan partai politik di Indonesia” <https://jurnal.radenfatah.ac.id>

Affan Sulaeman “demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah” <https://jurnal.unpad.ac.id>

Ellya yosana “partai politik dan pembangunan <https://core.ac.uk>

Efriza” ekstensi partai politik dalam persepsi publik” <https://jurnal.dpr.go.id>

Daud M. Liando “pemilu dan partisipasi partai politik masyarakat” <https://ejournal.unsrat.ac.id>.